



2016

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA****B1**

Tambahkan Berita Negara R.I Tanggal 9 Agustus 2016 No. 63

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)****BIDANG : YUDIKATIF  
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NENDI RUSNENDI, S.H.
2. Jabatan : HAKIM - PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
3. NHK : 86050
4. Alamat Kantor : Jl. K.H. ABDUL HALIM NO. 499, MAJALENGKA
5. Tanggal Pelaporan : 2 Maret 2009, 13 Maret 2015

**Status Laporan**

	2 Maret 2009	13 Maret 2015
A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)		
1. Tanah & Bangunan seluas 368 m2 & 63 m2, di Kota TASIKMALAYA, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 1993 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 147.875.000	Rp. 290.834.000
2. Tanah seluas 319 m2, di Kabupaten LAMPUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 20.000.000	Rp. 22.000.000

**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK  
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 368 m2 & 63 m2, di Kota TASIKMALAYA, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 1993 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)
2. Tanah seluas 319 m2, di Kabupaten LAMPUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)

	2 Maret 2009	13 Maret 2015
3. Tanah & Bangunan seluas 140 m2 & 45 m2, di Kota TASIKMALAYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 (Penambahan Data Baru)	----	Rp. 71.055.000

## B. HARTA BERGERAK

### a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA

	Rp. 93.000.000	Rp. 126.000.000
1. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2005, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2005 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 8.000.000	Rp. 6.000.000
2. Mobil, merk TOYOTA AVANZA, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN, perolehan tahun 2012 (Penambahan Data Baru)	----	Rp. 120.000.000
3. Mobil, merk TOYOTA KIJANG, tahun pembuatan 1997, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN, perolehan tahun 2007 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 85.000.000	----

### b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA

	Rp. 18.162.500	Rp. 68.375.000
c. HARTA BERGERAK LAINNYA		
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2003 sampai dengan 2013 (Penambahan Data Baru, Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 8.312.500	Rp. 49.675.000

	2 Maret 2009	13 Maret 2015
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 (Penambahan Data Baru, Penghapusan Data Karena Dijual, Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 9.850.000	Rp. 18.700.000
<b>C. SURAT BERTAGIH</b>	Rp. 0	Rp. 0
<b>D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA</b>	Rp. 23.240.588	Rp. 196.518.713
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 23.240.588	Rp. 196.518.713
<b>E. PIUTANG</b>	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
<b>TOTAL HARTA (II)</b>	Rp. 332.278.088	Rp. 721.727.713
<b>III. HUTANG</b>	Rp. 49.000.000	Rp. 150.000.000
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Hutang baru, Penghapusan atas data dilaporkan sebelumnya karena lunas)	Rp. 49.000.000	Rp. 150.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )</b>	Rp. 283.278.088	Rp. 571.727.713

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

Berita Resmi Pengadilan, sebagaimana

Terang 10 Agustus 2016 No:03

